

SKRIPSI

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**

Disusun dan Diusulkan :

MAKASSAR

RISWANDI

Nomor Stambuk : 105641106416



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan Disusun dan Diusulkan oleh

Riswandi

Nomor Stambuk : 105641106416

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

03/02/2022

1 smp
Smb. Alumnus

P/0011/1PM/22 CP
RIS
k

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Nama Mahasiswa : Riswandi
Nomor Stambuk : 105641106416
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui :

Pembimbing I

Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

Pembimbing II

Drs. Ansyari Mone, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketuan Pogram Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM : 1031 102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 003/FSP/A.4-II/I/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM : 730772

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M. Si (Ketua)
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM
3. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP

()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riswandi

Nomor Stambuk : 105641106416

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di
Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, maka gelar yang di peroleh ini karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Riswandi

ABSTRAK

RISWANDI: *Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru* (dibimbing oleh St. Nurmaeta dan Ansyari Mone)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di kecamatan Barru Kabupaten Barru, metode penelitian ini adalah kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi waktu. Bertujuan untuk Mensejahterakan Masyarakat.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di kecamatan Barru Kabupaten Barru ini menggunakan 4 indikator yaitu 1. Kesatuan Tindakan 2. Komunikasi 3. Pembagian Kerja 4. Disiplin dan Faktor Pendukungnya pelaksanaan program BPNT adalah dukungan finansial yang terus mengalir pada saat pencairan sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan sedangkan faktor penghambatnya masih sering terjadi saldo nol pada kartu KPM dan seringnya terjadi error pada mesin EDC pada saat transaksi penyaluran BPNT.

Kata Kunci : *Koordinasi, Bantuan Pangan Non Tunai*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di kecamatan Barru Kabupaten Barru yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua penulis yang tercinta, Halim dan Suriani yang sangat berjasa bagi penulis. Orang tua yang senantiasa mencurahkan kasih sayang,

yang selalu hadir dan menyertai penulis dengan doa-doa dan juga memberi motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Ansyari Mone, M.S.i selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.A.g
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru, Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kecamatan Barru dan Jajarannya, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung
8. Rekan-Rekan mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang selalu bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas akademik.

9. Sahabat-Sahabat KPAJ Makassar Komunitas Pecinta Alam Makassar yang telah memeberikan pengetahuan tentang menyelamtkan dan mencintai lingkungan hidup.
10. Teman-teman kelas IP B yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia, Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-Teman Demisioner Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Periode 2018-2019
12. Teman-teman kost yang saya temani mulai dari awal semester sampai selesai. Akhirnya dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan Aamiin.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 02 Desember 2021

Riswandi

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerima Tim	iv
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pengertian Koordinasi.....	9
C. Pemerintah Daerah.....	19
D. Program Bantuan Pangan Non Tunai	23
E. Kerangka Pikir	31
F. Fokus Penelitian.....	32
G. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	41
B. Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Barru Kabupaten Barru	56
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program BPNT Kecamatan Barru Kabupaten Barru	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian	35
Tabel 2. Pembagian Luas Administrasi Kabupaten Barru.....	42
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2025 s.d Tahun 2019	44
Tabel 4. Jumlah KPM Per Kecamatan di Kabupaten Barru	51
Tabel 5. Jumlah penerima BPNT Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Barru ..	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Barru.....	41
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barru.....	47
Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Barru	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidak mampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu SDM yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah.

Indonesia sebagai sebuah negara. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS No.10 Tahun 2017 tentang Program keluarga harapan (PKH) dan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Adanya program pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat

mewujudkan keluarga sejahtera. Sehingga diharapkan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dapat berjalan secara efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan dengan mengukur efektivitas sebuah program. Efektif atau tidaknya program dapat dilihat dari hasil akhir program yakni sejauhmana tercapainya tujuan program.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di berbagai wilayah Indonesia salah satunya di wilayah Kab Barru Sulawesi selatan dengan jumlah penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 10.132 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk masyarakat Kabupaten Barru.

Pada awalnya, program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2017) menjelaskan bahwa pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu : Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan Exclusion Error dan Inclusion Error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. sementara, inclusion error sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut. Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta

untuk mendorong keuangan inklusif, dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan, khusus subsidi beras yang semula disalurkan melalui proram rasta, mulai dari tahun 2017 secara bertahap penyalurannya dilakukan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai uang selanjutnya disebut BPNT.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Barru Belum sesuai dengan mekanisme yang ada. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dibentuklah tim pelaksana program Ditingkat kota/Kabupaten Melalui Forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota melakukan Koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan kelurahan untuk semua tahapan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Pemerintah Kabupaten/kota dan memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi, dan sosialisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksana Program BPNT ditingkat Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh tim koordinasi Bansos Pangan kabupaten/kota, Pelaksana ditingkat kecamatan dikoordinasikan oleh tim koordinasi Bansos Pangan Kecamatan, Pelaksana ditingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan tenaga pelaksana BPNT.

Sasaran program BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksanaan BPNT, dan namanya termasuk didalam daftar KPM BPNT yang ditetapkan. Berdasarkan latar

belakang tersebut peneliti akan meneliti lebih jauh terkait **“Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti tersebut, maka tujuan yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya dan menerapkan konsep-konsep ilmu pengetahuan khususnya yang mengkaji tentang pemerintahan karena berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah untuk melakukan upaya mengefektifkan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan dapat dijadikan bahan pertimbangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Benny Rachman, (2018) tentang efektivitas dan perspektif pelaksanaa program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) disimpulkan bahwa ketidak tepatan data sasaran program Rastra/BPNT masih terbilang tinggi karena data yang digunakan memiliki sumber yang berbeda. Keefektivitasan program BPNT dan Rastra harus segera diselesaikan. Permasalahan utama dari Rastra yaitu sasaran belum tepat, jumlah beras, rapel beras dan kualitas beras rendah. Kemudian pada program BPNT masalah kesiapan e-warong dan jangkauan signal, sasaran dan kualitas beras.

Berdasarkan penelitian Ika Surya Kharismawati, (2018) tentang implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui e-warong di Kelurahan Sidosermo kecamatan Wonocolo Surabaya disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT menunjukkan jika ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai dengan maksimal hal ini dikarena masalah mesin EDC yang mengakibatkan bantuan terhambat dalam penyaluran tetapi Finansial. SDM dan dana yang tersedia mendukung implementasi program.

Berdasarkan penelitian Risnandar, (2018) tentang implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Indonesia disimpulkan bahwa penyaluran program BPNT melalui e-warong sudah cukup efektif dan efesien serta progresif dan sudah potensial dalam pemberdayaan KPM secara *sustainable*.

Tetapi masih perlu perbaikan seperti perlunya pendampingan secara intensif berkelanjutan, pemantapan proses bisnis secara kompeherensif dan pembangunan jejaringan kerja.

B. Konsep Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Istilah dalam bahasa Inggris disebut "*coordination*". Istilah *coordination* terdiri dari dua kata yaitu "*co*" yang artinya bersama, dan "*ordination*" yang berarti memerintah. Jadi *coordination* berarti memerintah bersama. Secara etimologis istilah *coordination* berasal dari bahasa Latin yaitu "*cum*" yang berarti berbeda-beda, dan "*ordinare*" yang artinya menyusun atau menempatkan sesuatu pada keharusannya (Pariata Westra, 2001). Menurut Fayol bahwa fungsi koordinasi memungkinkan adanya kesatuan, keterpaduan antar unit, antar pejabat, serta keharmonisasi organisasi (dalam Sugandha, 2000). Jame D. Mooney (dalam Handayaniingrat, 2001) mendefinisikan koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan, koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Laras seimbang dan serempak dalam mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya konflik, kekacauan, percekcoan, kekosongan dan sebagainya dalam suatu organisasi.

Hasibuan (2014: 85) mendefinsikan Koordinasi adalah kegiatan, unsur

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi merupakan bagian terpenting di antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang pekerjaannya saling bergantung. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan terjadi negosiasi agar mendapat kesepakatan.

Dalam (Rahmat & Wahid, 2016) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Handoko (2011: 195) berpendapat koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.

Penulis menyimpulkan berdasarkan beberapa pengertian koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menyerasikan kesamaan tiap langkah dan kegiatan oleh antar organisasi agar tercapai suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini koordinasi dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana koordinasi yang dapat menentukan

langkah dan mengambil keputusan, dan pihak lainnya seperti swasta dan masyarakat.

2. Ciri-ciri Koordinasi

Ciri-ciri Koordinasi Menurut Handayani (2002) adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*continue process*) artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Hal ini berarti pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama. dari pada

setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama.

- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan dari usaha/ tindakan meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

3. Tujuan Koordinasi

Sebuah kegiatan pasti memiliki tujuan, koordinasi juga memiliki tujuan. Dalam (Mali et al., 2019) tujuan Koordinasi yaitu :

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai pihak dalam organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsive antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Sedangkan tujuan koordinasi menurut Hasibuan (2014: 87) :

- a. Untuk mengarahkan semua tindakan untuk tercapainya sasaran
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis, kearah sasaran perusahaan.

- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
- e. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan ke arah organisasi.
- f. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran organisasi.

Koordinasi sangat penting pada setiap hubungan kerja dalam suatu organisasi, sebab tanpa ada koordinasi setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai pegangan dalam menentukan tujuan mereka, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Adanya koordinasi diharapkan akan membuat keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga tiap departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras. Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang serasi, selaras dan seimbang. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.

4. Jenis-jenis Koordinasi

Menurut Handyaningrat (2002) terdapat jenis-jenis Koordinasi diantaranya yaitu:

a. Koordinasi Intern

Koordinasi Intern yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan kegiatan bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

b. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, Koordinasi Fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, Koordinasi Fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional yang bersifat intern dan ekstern.

1. Koordinasi Fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja fungsional.
2. Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Koordinasi fungsional ini dilakukan karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari orang lainnya.

5. Karakteristik Koordinasi yang baik

Menurut Syamsi koordinasi yang baik harus dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi. Pembagian tugas berkaitan dengan proses membagi tugas ke dalam suatu unit-unit tugas yang secara berturut-turut lebih kecil. Semua tugas dispesialisasikan ke dalam derajat yang sama, karena tidak semua orang dapat melakukan sesuatu, tetapi beberapa tugas sangat berbeda dengan tugas yang lainnya. Salah satu manfaat utama dari mengorganisasikan tugas adalah bahwa kelompok orang yang bekerja sama melalui pembagian kerja mampu menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan sendiri.
- b. Adanya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi. Manusia memiliki kepribadian yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu manusia akan selalu melakukan interaksi dan kerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya. Kerjasama juga dilakukan agar individu dapat mempermudah dalam melakukan kegiatannya, dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan semangat kerja sama yang besardalam organisasi maka hasil yang didapatkan maksimal.
- c. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup di antara orang-orang dalam organisasi. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang baik, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan

pemrosesan informasi, semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi, sedangkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti email dan sebagainya untuk mempermudah proses koordinasi tersebut. Tugas-tugas memerlukan kontak dan tingkat koordinasi yang tinggi antara atasan dengan bawahan, maka seharusnya menggunakan rentang kendali yang sempit.

- d. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembinaan dan pengendalian. Perencanaan yang dimaksud yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jika sejak awal telah melakukan perencanaan dengan tepat, maka proses-proses berikutnya akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi yang dicapai juga akan maksimal, kemudian dilakukan proses pembinaan agar rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dalam kegiatan koordinasi, pengendalian memiliki peran yang sangat penting, Fungsi proses pengendalian ini adalah untuk mengevaluasi tujuan yang telah dicapai, dan apabila tujuan tidak tercapai dengan baik, maka dapat dicari mengenai faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan.

6. Indikator Koordinasi

Adapun indikator koordinasi (Manoppo et al., 2017) sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan

Hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam didalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pemimpin untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampain dan pertukaran informasi yang sekurang kurangnya antara 2 pihak yang berperan sebagai pengirim (*sender*) dan penerima (*receiver*) dengan menggunakan berbagai media yang ada. (Fitria, 2018) Bahwa komunikasi memiliki elemen penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Komunikasi melibatkan orang-orang, sehingga komunikasi yang efektif dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan efektif.

b. Dalam komunikasi terjadi penyampain dan pertukaran informasin dan pengertian, sehingga agar proses ini dapat terjadi dan dipahami, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah dalam komunikasi. Komunikasi dapat berupa bentuk-bentuk simbolis seperti suara, huruf, angka, bahasa dan lainnya.

c. Pembagian kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok duan atau lebih orang yang yang berkerja sama dengan secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih dari pada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, pada dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksiunya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja.

d. Disiplin

Setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah suatu usaha penyusuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, untuk itu diperlukan dsiplin.

C. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. dan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan

pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan negara sangat luas. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

1. Susunan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah. Pemerintah daerah dapat berupa:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi sekretaris daerah, dinas daerah.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

2. Perangkat Daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sekretaris Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/ Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan. kota diangkat dan diberhentikan

oleh Gubernur atas usul Bupati/ Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi. Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan Kabupaten/kota.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dan pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung yugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, Berbentuk badan , kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, kepala rumah sakit daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota

dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/walikota.

3. Asas-Asas Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas-asas sebagai berikut.

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah untuk mengurus dan mengatur daerah sendiri. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai, sosial, politik, kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaanya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah sendiri

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah Provinsi atau kepala instansi

vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintahan pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

D. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan sosial dari pemerintah. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka

dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya selanjutnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah program bantuan pangan non tunai (BPNT) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016 memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden no. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut dilaksanakan melalui penyaluran program bantuan sosial secara nontunai kepada para penerima bantuan.

Berdasarkan Permensos No. 10 Tahun 2017 dan Permensos No.25 Tahun 2016 Bantuan pangan non tunai merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk kedalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat

(KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

1. Dasar Hukum Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. UU No.25/Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. UU No.13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- c. UU No.18/Tahun 2012 tentang Pangan.
- d. UU No.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Perpres No.82/Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan inklusif(SNKI).
- f. Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai (BSNT).

2. Tujuan dan Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).
- e. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).

- f. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- g. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

3. Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
- b. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi.
- c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat (KPM).
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

4. Tim Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dibentuklah tim pelaksana program. Ditingkat kota/Kabupaten untuk penanggung jawab pelaksanaan program adalah Walikota/Bupati. Di tingkat kota dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari unit-unit pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing masing. Pelaksana Program BPNT ditingkat kota yaitu:

- a. **TIKOR (Tim Koordinasi)** ditingkat kota Atau Kabupaten
Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos

pangan di wilayahnya dan membuat tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota/ Kabupaten adalah pelaksana Program Bansos Pangan di Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Melakukan Koordinasi Perencanaan, anggaran pemutakhiran data KPM, sosialisasi pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

3. Fungsi

Dalam Melaksanakan Tugas tersebut, terkait Program BPNT Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi Perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos pangandi Kabupaten/kota dengan aparaturn setempat.
- b. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengkoordinasikan dengan Bank dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
- c. Menyediakan Pendamping dan/atau aparat sosialisasi, verifikasi penerima bantuan dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

- d. Melakukan sosialisasi Program Bansos Pangan kepada jajaran erah tingkat Kabupaten/Kota, pendamping BPNT.
- e. Perencanaan dan Koordinasi penyaluran BPNT dengan Bank

4. Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota

Beranggotakan unsur-unsur OPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab/Kota, OPD yang membidangi urusan pangan serta OPD terkait lainnya. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dibantu oleh Koordinator Kabupaten/Kota PKH dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan (TKS) dalam pendampingan Program BPNT.

b. TIKOR (Tim Koordinasi) ditingkat Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Bansos Pangan di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan.

1. Kedudukan

Tikor Bansos Pangan Kecamatan adalah Pelaksana Program Bansos Pangan di Kecamatan yang berkedudukan di bawah.

2. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan sosialisai pengaduan, pemantauan, dan evaluasi Program BPNT ditingkat Kecamatan serta melaporkannya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kab/Kota.

3. Fungsi

- a. Sosialisasi Program Bansos Pangan di wilayah kecamatan.
- b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bansos di desa/kelurahan.
- c. Pembinaan terhadap desa/kelurahan terkait Program Bansos Pangan.
- d. Pelaporan Pelaksanaan Program Bansos Pangan pada Tikor Bansos Pangan Kab/Kota.

Tikor Bansos Pangan Kecamatan terdiri dari penanggung jawab (Camat), Ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan camat. Keanggotaan Tikor Bansos Pangan Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain: Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait serta koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

c. TKSK (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat)

Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan Kota dan Kecamatan dan perangkat desa tentang pelaksanaan Program BPNT, melengkapi data KPM untuk pembukaan rekening, membuat jadwal distribusi Kartu Kombo, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM tentang penggunaan Kartu Kombo dan transaksi non tunai, mendampingi KPM selama Proses Registrasi, aktivasi rekening dan pencairan.

d. Kepala Desa/Lurah

Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan tingkat Kab/Kota, Tim

Koordinasi Bansos Kecamatan dan Pendamping BPNT untuk menyusun jadwal pendistribusian Kartu Kombo beserta aktivasi rekening oleh KPM, menyediakan tempat untuk distribusi, dan aktivasi Kartu Kombo, memobilisasi KPM dalam pendistribusian.

E. Kerangka Pikir

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah Bagaimana Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program BPNT Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru, ada 4 (empat) indikator koordinasi antara lain, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, disiplin. Dari indikator tersebut akan diteliti sehingga dapat digambarkan Bagan kerangka Pikir dibawah ini.

Bagan Kerangka Pikir

Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program BPNT Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Faktor Pendukung:

Dukungan Finansial yang terus mengalir pada saat pencairan sehingga dapat menentukan kesuksesan dalam pelaksanaan Program BPNT

(Manoppo et al., 2017) indikator yang mempengaruhi Koordinasi

- 1. Kesatuan tindakan
- 2. Komunikasi
- 3. Pembagian Tugas
- 4. Disiplin

Faktor Penghambat:

Masih sering terjadi saldo nol pada kartu KPM dan seringnya terjadi error pada mesin EDC pada saat transaksi penyaluran BPNT

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Yang dimana Fokus Penelitian ini Memfokuskan 4 indikator yaitu: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan pada Hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota koordinasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dan tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi tersebut dan tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga pemimpin harus menyediakan fokus dan arah dalam mengatur jadwal dan pembagian waktu Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan BPNT, agar semua tugas dapat diselesaikan dengan sukses dan sesuai dengan rencana dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampain dan pertukaran informasi yang sekurang-kurangnya antara 2 pihak yang berperan sebagai pengirim (*sender*) dan penerima (*receiver*) dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan

rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi baik berupa rapat atau pertemuan formal, selain itu fasilitas komunikasi yang bisa digunakan secara informal adalah via suara atau Grup Obrolan *Whatsapp* sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk memberikan kritik dan saran kepada Kelurahan dan Kecamatan mengenai Pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

3. Pembagian kerja

Dua Kelompok atau lebih yang bekerja sama secara kooperatif dan dikoordinasikan untuk dapat mencapai hasil lebih dari pada dilakukan perseorangan. dalam suatu organisasi, pada dasarnya adalah prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, apa yang sudah menjadi pembagian kerja harus sejelas-jelasnya dan rinci untuk mempermudah dalam pelaksanaan Program BPNT Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, sertiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. masing-masing pemimpin SKPD harus melaksanakan konsep disiplin baik disiplin waktu dengan melakukan briefing sebelum melakukan Pekerjaan untuk mengupayakan tepat waktu dalam menyelesaikan semua program kegiatan Pelaksanaan program BPNT di kecamatan Barru Kabupaten Barru.

5. Faktor Pendukung

Yang mendukung atau mendorong terjadinya Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dikecamatan Barru Kabupaten Barru karna dukungan Finansial Yang terus mengalir pada saat pencairan sehingga dapat menentukan kesuksesan dalam pelaksanaan program BPNT.

6. Faktor Penghambat

Faktor Yang sifatnya menghambat dan menahan terjadinya segala sesuatu dapat dilihat dari kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dikecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu masih sering terjadi saldo nol pada kartu KPM dan seringnya terjadi error pada mesin EDC pada saat transaksi penyaluran BPNT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, Mulai Pada Tanggal 24 Februari sampai 24 April. sedangkan Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Barru. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut karna merupakan Tim Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objek penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Koordinasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung.
2. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia, data sekunder ini berupa

dokumen-dokumen, laporan, bacaan, dan berupa peraturan-peraturan yang tentunya berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan fenomena penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun informan penelitian digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1	Ridwan Nurdin, S.Sos	RN	Ketua Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial
2	Hj. A. Hilmanida, S.STP, M.si	Hj.A.H	Camat Kecamatan Barru
3	Dra. Hj. Mukarrama	Hj.M.K	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan
4	Muhammad Nur Abdu, SE	N.A	TKSK Kecamatan Barru
5	Samsuardi Manggenre	S.M	Sekdes Desa Anabanua
6	Suhaeda	S.H	Keluarga Penerima Manfaat
7	Hartawan	H.T	Keluarga Penerima Manfaat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang paling independen terhadap semua teknik pengumpulan data adalah: Observasi, wawancara (interview) atau pengamatan langsung dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau metode pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitiannya yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada Informan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Pada penelitian ini dokumen yang didapatkan Pada dasarnya, dokumen untuk memperkuat penelitian kualitatif agar dapat lebih dipercaya adalah dokumen dokumen seperti foto-foto kegiatan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data meliputi 3 komponen analisis yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang

merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Redukasi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, disusun lebih sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data lebih muda kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber data lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda, misalnya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda misalnya dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan adanya triangulasi ini tidak sekedar menilai kebenaran data, akan tetapi juga dapat untuk menyelidiki validitas tafsiran penulis mengenai data tersebut, maka dengan data yang ada akan memberikan sifat yang reflektif dan pada akhirnya dengan triangulasi ini akan memberikan kemungkinan bahwa kekurangan informasi yang pertama dapat menambah kelengkapan dari data yang sebelumnya.

3. Verifikasi data/ Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapat merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Tahapan-tahapan dalam analisis data diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan satu dan tahapan lainnya.

G. Teknik Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam (Pratiwi, 2017) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data, dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan

sumbe data yang telah ada. Misalnya membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara peribadi

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian dideskripsikan dan dianalisis lalu peneliti menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya diminta kesepakatan dengan berbagai sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi ataupun dengan dokumentasi. Jika dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang benar.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk melakukan pengujian kredibilitas data dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, misalnya data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dengan wawancara disiang hari saat narasumber masih mulai lapar, kemungkinan akan mengalami perbedaaan, inilah yang akan dicocokkan data mana yang lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Barru

Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini berada di Kota Barru. Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu Kerajaan Barru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda di mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah Onder Afdelling Barru yang bernaung di bawah Afdelling Parepare. Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Daerah Kabupaten Barru dengan ibukota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada ± 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibukota Sulawesi Selatan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang terletak dipesisir pantai barat Provinsi

Sulawesi Selatan dengan garis pantainya 78 Km. Secara geografis terletak diantara koordinat $4^{\circ}5'49''$ - $4^{\circ}47'35''$ lintang selatan dan $119^{\circ}35'00''$ - $119^{\circ}49'16''$ bujur timur dan berada di sebelah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat $\pm$ 2,5 jam. Adapun batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Barru

Wilayah Kabupaten Barru berada di bagian barat daratan Pulau Sulawesi sekitar kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar, secara administratif

kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 Km2. Kabupaten Barru terbagi atas 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibu kota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Ballusu dan terd iri dari 14 Kelurahan dan 40 Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai peta administrasi Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut. Kecamatan Pujananting merupakan wilayah terluas yaitu 314,26 Km2 atau sekitar 26,75%, sedangkan Kecamatan Tanete Rilau merupakan wilayah terkecil yaitu hanya 79,17 Km2 atau sekitar 6,74%. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Barru dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2. Pembagian Luas Administrasi Kabupaten Barru

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas	
			Km ²	%
1.	Tanete riaja	7	174,29	14,84
2.	Tanete rilau	10	79,17	6,74
3.	Barru	10	199,32	16,97
4.	Soppeng Riaja	7	78,90	6,71
5.	Mallusetasi	8	216,58	18,44
6.	Pujananting	6	314,26	26,75
7.	Balusu	6	112,20	9,55
Jumlah		54	1174,72	100%

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2020

2. Topografi Kecamatan

Jarak antara ibukota desa/kelurahan dengan ibukota kecamatan Barru cukup bervariasi antara 0 km sampai 24 km. adapun desa/kelurahan yang memiliki

jarak terdekat dengan ibukota kecamatan adalah kelurahan Sumpang Binangae dan desa/kelurahan dengan jarak terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Anabanua dengan jarak 24 km atau sekitar 40 menit dari ibukota kecamatan. Kecamatan Barru secara administratif terbagi atas 10 desa/kelurahan. Daerah ini terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan laut dengan bentuk sebagian besar daerah kemiringan berbukit hingga bergunung-gunung, wilayah bertopografi perbukitan hingga pegunungan berada disebagian besar wilayah tengah hingga timur dan selatan dan sebagian juga merupakan kawasan karst

3. Hidrologi dan iklim

Di kabupaten Barru terdapat 21 sungai yang tersebar di 7 kecamatan. Sungai Jampue dikecamatan Mallusetasi sungai terpanjang di kabupaten Barru dengan panjang sungai 45,55 km kemudian sungai Sumpang Binangae dikecamatan Barru dengan panjang 44,95 km. di kabupaten Barru terdapat seluas 71,79% wilayah (84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (oktober-maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (april-september). Total hujan selama setahun di kabupaten barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan desember – januari dengan jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing-masing 104 mm dan 17 mm.

4. Keadaan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Barru tiap tahunnya meningkat, peningkatan ini dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan

ekonomi. Akan tetapi mendorong perkembangan ekonomi bila pertambahan penduduk memperbesar jumlah tenaga kerja yang meningkatkan pertambahan produksi dan perluasan pasar serta berdampak pada aktifitas kegiatan perekonomian. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut jenis kelamin pada tahun 2015 s.d tahun 2019

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	RASIO
1	2015	82,207	89,010	171,217	92
2	2016	82,619	89,287	171,906	93
3	2017	83,082	89,685	172,767	93
4	2018	83,489	90,134	173,623	93
5	2019	83,878	90,445	174,323	93

Sumber: Barru dalam angka tahun 2020

5. Pendidikan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahawa sasaran pendidikan dititik beratkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan, yaitu mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Upaya peningkatan pendidikan yang ingin dicapai tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten Barru yang notabenenya yang berwawasan luas untuk membangun kabupaten Barru menuju kota yang aman. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah yang setiap tahunnya.

6. Profil Instansi Objek Penelitian

a. Pemerintah Kabupaten Barru (Dinas Sosial)

Dinas sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial,

Dinas Sosial melaksanakan tugas :

1. Perumusan Kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang sosial
2. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang sosial
3. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang sosial
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati

Mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, nomenklatur perangkat daerah Dinas Sosial dengan

Struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, Meliputi :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Sub Bagian umum dan SDM

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
2. Seksi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
3. Seksi Tuna Sosial

d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat Dan Penyuluhan Sosial

2. Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan, kesetiakawanan Sosial

3. Seksi Pembinaan Sosial Fakir Miskin

e. Bidang Bantuan Dan Perlindungan Sosial, Terdiri dari :

1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana

2. Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial

3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jamsos

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Barru

Visi :

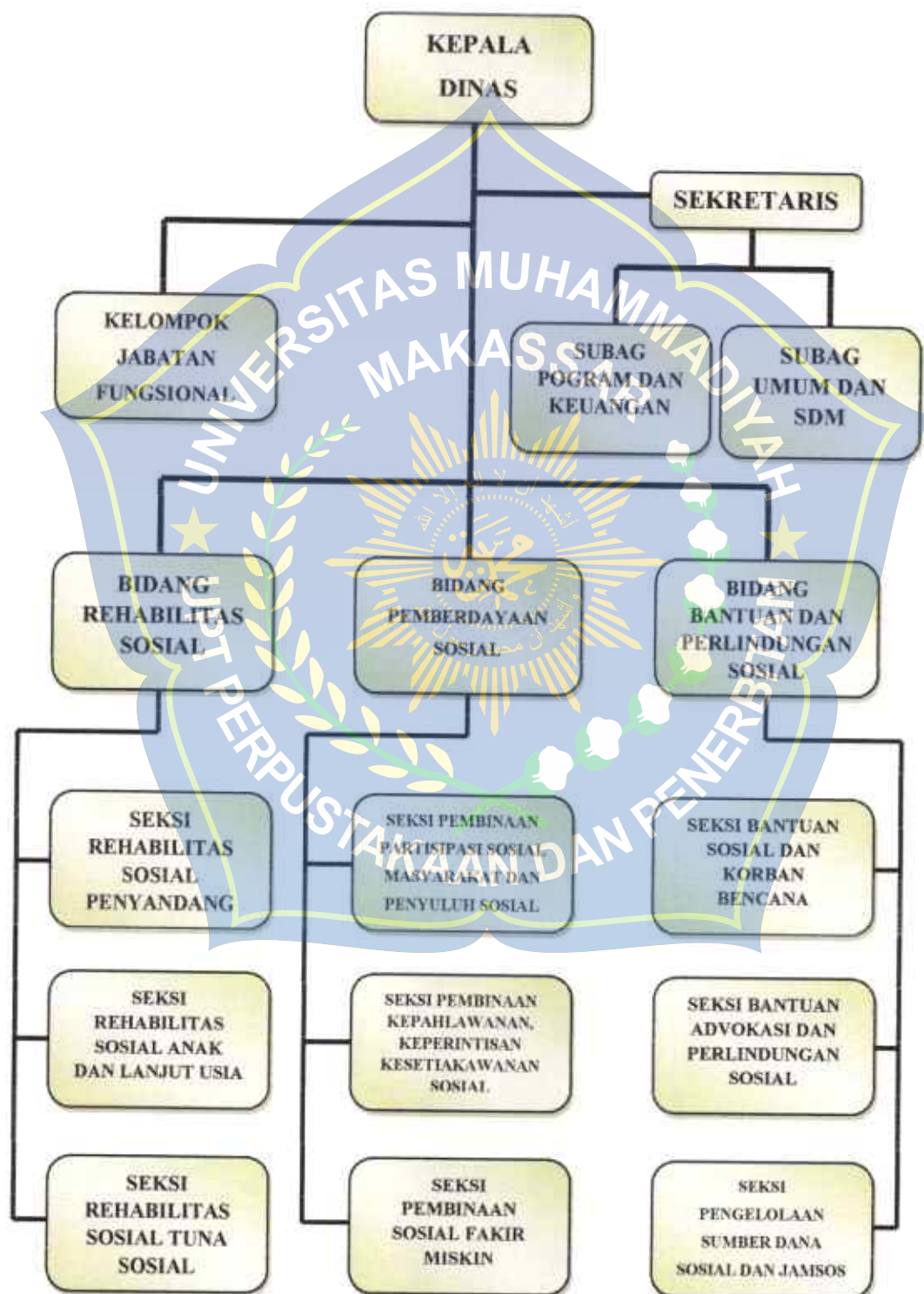
Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Taat Azas dan Bernafaskan keagamaan

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan Peran Serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pembangunan Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan
4. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Dalam Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barru Secara Lebih Jelas adalah Sebagai Berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BARRU



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barru

b. Pemerintah Kabupaten Barru (Kecamatan Barru)

Kecamatan Barru yang merupakan bagian dari kabupaten Barru yang mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam mendukung kedudukan kabupaten Barru sebagai salah satu pusat pelayanan bagi kawasan timur Indonesia. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bagi pemerintah Kabupaten Barru dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi pada rencana strategis perubahan. Dengan dukungan unit-unit kerja dalam lingkup pemerintahan kabupaten Barru termasuk pemerintah Kecamatan Barru.

Adapun visi dan misi Pemerintah Kecamatan Barru

Visi :

Mewujudkan pemerintah yang profesional, responsif, Berorientasi Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing masyarakat.

Misi :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik Prima
2. Meningkatkan Pemerintah Kecamatan Barru secara Efektif, Profesional dan Akuntabel.
3. Mewujudkan efektifitas Penyelenggara Administrasi Pemerintahan dalam memberikan Pelayanan yang baik bagi masyarakat

Sesuai dengan Visi dan Misi diatas, Pemerintah Kabupaten Barru mempunyai Tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik

yang prima, meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan Barru secara efektif, professional, dan akuntabel serta mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Barru sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Barru

7. Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Barru

Peserta atau penerima bantuan pangan non tunai keluarga, yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan pangan non tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan non tunai adalah

data terpadu program penanganan fakir miskin yang selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil pemuktahiran basis data terpadu ditahun 2015. DT-PFM dikelola oleh kelompok kerja pengelola terpadu program fakir miskin, yang selanjutnya disebut pokja data, yang dibentuk melalui surat keputusan menteri sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 september 2016. Pokja data terdiri dari kementerian coordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (KEMENKO PKM), kementerian PPN/Bappenas, kementerian dalam negeri (KEMENDAGRI), Kementerian sosial (KEMENSOS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar penerima manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 ditetapkan oleh menteri sosial. KPM bantuan pangan non tunai 2017 adalah keluarga yang namanya termasuk didalam DPM. DPM diserahkan kepada bank penyalur dan pemerintah daerah oleh kementerian sosial. Bank penyalur kemudian membukakan rumah rekening berdasarkan DPM. Rumah rekening akan berubah menjadi akun elektronik bantuan pangan setelah proses pendaftaran peserta selesai. Apabila KPM yang namanya yang terdaftar dalam DPM Telah memiliki rekening untuk penyalur program bantuan sosial lain, maka rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima program bantuan pangan non tunai . untuk setiap KPM , DPM memuat informasi nama kepala keluarga, nama pasangan kepala keluarga, nama anggota kepala keluarga, nama anggota keluarga lainnya, alamat tinggal, nomor induk kependudukan (NIK) jika ada dan kode unik

keluarga. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas ketetapan sasaran bantuan sosial, kecamatan Barru juga menjadi salah satu wilayah pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Barru. Berikut Tabel Jumlah KPM Per kecamatan di Kabupaten Barru.

Table 4. Jumlah KPM Per Kecamatan di Kabupaten Barru

NO	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1	BALUSU	1179
2	SOPPENG RIAJA	1255
3	TENETE RIAJA	1502
4	TANETE RILAU	1812
5	PUJANANTING	1926
6	MALLUSETASI	2103
7	BARRU	2414
	JUMLAH	12.191

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Barru

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dengan tingkat KPM yang tinggi adalah Kecamatan Barru dengan jumlah KPM Sebanyak 2414 orang sedangkan, kecamatan dengan jumlah tingkat KPM paling rendah adalah kecamatan Balusu. Program BPNT merupakan salah satu Program dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini, kecamatan Barru dalam meminimalisir tingkat kemiskinan.

Keikutsertaan Kecamatan Barru dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) , dengan didasari banyaknya jumlah masyarakat miskin merupakan sebuah bentuk keprihatian pemerintah baik pemerintah setempat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi

Sulawesi selatan terhadap banyaknya masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jumlah KPM sebanyak 2414 orang, pemerintah kecamatan Barru berkoordinasi dengan tim koordinasi bansos kabupaten Barru untuk melakukan penyaluran kartu KKS dengan 2 tahap agar semua KPM mendapatkan.

Kecamatan Barru merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Barru, Adapun jumlah desa/kelurahan di kecamatan Barru adalah sebanyak 10 desa/kelurahan. Berikut Tabel Jumlah penerima BPNT per desa/kelurahan di kecamatan Barru :

Table 5. Jumlah Penerima BPNT Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Barru

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH KPM
1	SUMPANG BINANGAE	195
2	COPPO	266
3	TUWUNG	268
4	SEPE'E	265
5	SIAWUNG	216
6	PALAKKA	204
7	TOMPO	264
8	GALUNG	246
9	ANABANUA	289
10	MANGEMPANG	201
	JUMLAH	2414

Sumber : TKSK Kecamatan Barru 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa desa/Kelurahan. desa Anabanua Merupakan desa terbanyak yang mendapatkan BPNT dengan jumlah 289 KPM. Sedangkan desa/kelurahan yang paling sedikit mendapatkan BPNT adalah kelurahan Sumpang Binangae.

8. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Barru

Proses pendistribusian Kartu Kombo Di kecamatan Barru telah dilaksanakan sejak bulan oktober tahun 2018 oleh BNI sebagai Bank Penyalur yang ditunjuk oleh di Mentri Sosial di Kabupaten Barru dan. Kartu Kombo adalah kartu yang 55 memiliki dua fungsi yakni dibagian depan sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bagian belakang sebagai kartu ATM, kartu ini disertai buku rekening dandigunakan untuk pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada saat KPM datang ke e-Warong. Selanjutnya, untuk pencarian saldo yang ada di rekening setiap KPM dilakukan di eWarong yang ditetapkan oleh bank penyalur (BNI). e-Warong adalah Elektronik Warung Gotong Royong yang dibentuk oleh kelompok usaha bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH). e-Warong merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif KPM. Bank Penyalur (BNI)mengindentifikasi agen bank, pedagang, dan/pihak lain untuk menjadi eWarong penyalur BPNT. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur (BNI) dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Adapun Mekanisme Penyaluran BPNT Sebagai Berikut:

1. Proses Penyaluran dana BPNT dilaksanakan Oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya.
3. Proses Penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari rekening Kementerian Sosial dibank Penyalur ke rekening wallet KPM BPNT
4. Pemindahbukukan dana BPNT dilakukan paling lambat 30 hari kelender sejak dana tersebut ditransfer dr kas Negara ke rekening kementerian sosial
5. Penyaluran dana BPNT Ke Dalam rekening wallet KPM dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan
6. Proses Penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai belanja bansos yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu :

Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga atau Keluarga Penerima Manfaat yang seharusnya menerima Bantuan Pangan Non Tunai, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai, sehingga masyarakat tidak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai tersebut. sementara, *inclusion error* sebaliknya, Yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai, justru menerima bantuan tersebut.

B. Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Koordinasi adalah salah satu sistem fungsi dari manajemen yang memegang peranan yang sama pentingnya dan juga beserta dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai, dengan demikian walaupun memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda, dalam hal ini Dinas Sosial, Kecamatan, dan Kelurahan Kabupaten Barru. Namun koordinasi yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi atau membantu agar tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, pola Koordinasi yang efektif memiliki indikator-indikator penting yang menjadi acuan penting bagi tercapainya tujuan bersama. Adapun indikator Koordinasi yang menjadi acuan adalah, sebagai berikut:

1. Kesatuan tindakan
2. Komunikasi
3. Pembagian tugas
4. Disiplin

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Pemerintah Kecamatan Barru dan Kelurahan/Desa pada dasarnya, adalah merupakan kesadaran kolektif yang dibangun dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat.

1. Kesatuan tindakan dalam pelaksanaan Program BPNT

Kesatuan tindakan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik, jadi dalam pelaksanaan BPNT harus menyatukan tindakan sehingga segenab kegiatan manajemen maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpan siur, tidak berlawanan dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapaian tujuan dengan efesien. Kesatuan tindakan dapat menghindari berbagai kemungkinan untuk merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya kesatuan tindakan dalam pelaksanaan program BPNT dapat mempermudah terlaksananya kegiatan baik berupa sosialisasi, pengawasan, pelaporan maupun penyaluran.

Kesatuan tindakan antara atasan dan bawahan juga sangat diperlukan agar terjadi sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing demi terwujudnya tujuan dan kepentingan bersama dalam pelaksanaan program BPNT. Dari hasil wawancara dengan informan Ridwan Nurdin, S.Sos Sebagai ketua idang bantuan dan perlindungan sosial sebagai berikut :

“ Jadi sebelum berakhir rasta itu dan sebelum masuk BPNT, itu ada sosialisasi dulu, seperti apa model BPNT, apa itu BPNT, itu disosialisasikan dengan mengundang Camat kemudian dari Kepolisian, kemudian dari Lurah dan TKSK dan masyarakat, apabila ada perbaikan data KPM dan jadwa Penyaluran kami melakukan rapat koordinasi agar terjadi sinkronisasi . (Hasil wawancara R.N. Pada tanggal 23 Maret 2021).”

Wawancara dengan informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial, Kecamatan, dan Kelurahan selalu melakukan

pertemuan dan berkoordinasi bersama agar tercipta kesatuan tindakan agar terjadi sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial dalam hal ini ketua bidang bantuan dan perlindungan social diperjelas pula dari salah satu informan Pemerintah Kecamatan Barru yaitu Camat Kecamatan Barru Hj.A.Hilmanida,S.STP,M.Si tentang kesatuan tindakan antara Dinas Sosial, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

“Sebagai Pemerintah kecamatan kami selalu melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Kelurahan setiap ingin melakukan perbaikan data KPM, sosialisasi dan jadwal penyaluran bantuan pangan non tunai, di Kecamatan itu ada namanya TKSK nanti TKSK berkoordinasi dengan Kelurahan apabila ada perbaikan data atau penyaluran bantuan (Hasil wawanncara Hj. A.H. Pada tanggal 24 Maret 2021).”

Kesatuan tindakan antara Dinas Sosial dengan Kecamatan, Desa/Kelurahan jelas terlihat dalam pelaksanaan program BPNT dengan melakukan rapat koordinasi apabila ada data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ingin diperbaiki dan penyaluran bantuan. Kegiatan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai memang seharusnya diperlukan kesatuan tindakan antara Dinas Sosial, Kecamatan desa/Kelurahan agar peran masing-masing pihak dapat terlihat jelas dari informan Sekretaris desa Anabanua.

“Mmmm.. Nanti pada saat ada perubahan atau pembaruan daftar KPM kami melakukan yang namanya Musdes atau Muskel pada tahun berjalan dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat. Melalui Musdes atau Muskel ditetapkan keluarga yang diganti.(Hasil wawancara dengan S.M Pada Tanggal 26 Maret 2021).”

Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Anabanua diperjelas informan TKSK Sebagai Pendamping BPNT di Kecamatan Barru.

“Untuk mengenai Perubahan atau pembaruan daftar KPM kami itu melakukan musdes nanti hasilnya saya laporkan ke Pemerintah Kabupaten hal ini Dinas Sosial. Untuk penyaluran dikelurahan atau desa itu ada namanya Agen BPNT nanti pada saat sekian ketika saldonya sudah masuk di KKS nya, di kartu ATM nya itu, maka di informasikan pada seluruh KPM untuk datang keagen yang telah ditentukan. Dan penyampaian itu pertama memang menyurat yah pihak BNI menyurat TIKOR Kabupaten dalam hal ini ada Dinas Sosial, Dinas Sosial menyampaikan kepada teman-teman TKSK, Kemudian ke agen (Hasil wawancara dengan M.N.A. Pada tanggal 26 Maret 2021).”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa apabila ada perubahan atau pembaruan daftar KPM akan melakukan musdes atau muskel pada tahun berjalan dan hasilnya dilaporkan ke pemerintah kabupaten hal ini dinas sosial dan untuk penyaluran di kelurahan ata desa itu ada namanya Agen BPNT yang telah ditentukan.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi yang sekurang-kurangnya antara dua pihak yang berperan sebagai (*sender*) dan penerimaan (*receirver*) dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, Karen komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagai besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan semua pihak yang terkait untuk pencapaian tujuan bersama. Semua pihak yang melakukan koordinasi dan hubungan kerja pada dasarnya melakukan komunikasi. Dalam melakukan komunikasi juga perlu memperhatikan elemen-elemen dan jenis-jenis komunikasi yang ada agar dapat berkomunikasi efektif. Memahami konsep dan batasan/pengertian komunikasi, juga harus mengetahui secara jelas teknis dan hambatan dalam berkomunikasi. Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja, semua pihak harus menyadari dan memperhatikan hambatan-hambatan dan teknis-teknis berkomunikasi. Dari hasil wawancara informan Ridwan Nurdin, S.Sos selaku bidang bantuan dan perlindungan social sebagai berikut :

“Dari pihak Dinas Sosial itu sendiri kami menjalin komunikasi dengan Organisasi Pemerintah lainnya contohnya dengan Kecamatan dan Kelurahan yang dimana secara lisan maupun tulisan. Dalam lisan ini yang dimaksud disini yaitu mengadakan rapat, Seminar atau Lokakarya secara langsung. Jika dalam soal tulisan kami membuat suatu informasi komunikasi di media Online atau Sosial Media, dan apabila terjadi suatu kegiatan yang mendadak kami juga menggunakan media online sebagai komunikasi dalam penyampaian yang lebih cepat untuk Organisasi Pemerintah lainnya (Hasil wawancara R.N. Pada tanggal 23 Maret 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas telah kita ketahui bahwa pihak Dinas Sosial Kabupaten Barru telah melakukan komunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan program BPNT salah satu contohnya yaitu rapat langsung yang diadakan oleh pihak Dinas Sosial juga menggunakan media online atau media sosial untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan cepat. Adapun hasil

wawancara penelitian dari pihak Kecamatan yaitu camat kecamatan Barru sebagai informan terkait masalah komunikasi yang dilakukan antar Organisasi Pemerintah dalam pelaksanaan program BPNT sebagai berikut :

“Terkait dengan komunikasi dalam pelaksanaan program BPNT yaitu salah satunya melakukan sosialisasi yang dilakukan tiap bulannya dengan bekerjasama dengan Kelurahan dan Dinas Sosial yang dimana kita sebagai pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyampaikannya. Adapun dengan beberapa media yang ada kami sampaikan informasi mengenai BPNT, Dinas Sosial, Kelurahan, RT/RW ataupun Masyarakat secara tertulis melalui media online tersebut (Hasil wawancara Hj. A.H. Pada tanggal 24 Maret 2021.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut data kita ketahu bahwa Organisasi Pemerintah terkhususnya Kecamatan dalam hal berkomunikasi biasanya sering melakukan seminar sosialisasi atau rapat kerja dengan Organisasi Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan program BPNT. Dengan mengadakan sosialisasi Pemerintah lebih mudah lagi berkomunikasi untuk melaksanakan program BPNT mempererat hubungan msyarakat dan pemerintah. Berhubung dari wawancara penelitian yang di atas maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Samsuardi Mangenre selaku Sekretaris Desa Anabanua terkait komunikasi yang dilakukan dalam koordinasi yang dilakukan Organisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program BPNT. Sebagai berikut :

“Dalam Organisasi Pemerintah komunikasi yang dilakukan yaitu secara lisan maupun tulisan. Di Kelurahan itu sedniri komunikasi juga dilakukan secara lisan maupun tulisan. Contoh dalam Kelurahan memberikan komunikasi lisan yaitu dengan memberikan Seminar Program terhadap masyarakat dan dibantu oleh RT dan RW dalam menyampaikan informasi tertentu. Secara tulisan Organisasi Pemerintah dalam hal ini yaitu Kelurahan membuat Group Media Sosial dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang dimana anggota

dalam group yang dibuat baik itu dari RT, RW, dan Masyarakat (Hasil wawancara dengan S.M Pada tanggal 26 Maret 2021).”

Berhubung dari wawancara penelitian yang di atas maka peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat terkait komunikasi yang dilakukan Organisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program BPNT sebagai berikut :

“Komunikasi yang diberikan Organisasi Pemerintah kepada masyarakat sudah jelas dengan secara langsung dan juga dengan lewat media massa. Pemerintah mengadakan sosialisasi dengan kami dengan membangun komunikasi yang baik. Adapun komunikasi yang dilakukan Pemerintah dengan bekerja sama dengan RT/RW dalam menyampaikan sebuah pesan dari pemerintah untuk masyarakat (Hasil wawancara dengan S.H. pada tanggal 28 Maret 2021).”

Dari hasil wawancara diatas, bisa kita ketahui bahwa komunikasi organisasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai sudah dapat dikatakan berjalan dengan masyarakat dengan berkomunikasi secara langsung dan juga melalui media massa berkerja sama dengan RT/RW setempat dalam menyampaikan sebuah pesan dari pemerintah kepada masyarakat.

3. Pembagian kerja

Koordinasi dan hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi adanya upaya unyuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efesien melalui pembagian tugas. Tugas-tugas ini diwadahkan dalam unit-unit sebagai pelaksana dan penaggung jawab satu atau beberapa fungsi. Semua pihak dalam organisasi baik dari pihak pemerintah daerah,kecamatan maupun kelurahan agar dapat berjalan terpadu, serasi dan selaras dalam pencapain tujuan dan sasaran bersama dari masing-masing tugas yang

menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana pernyataan dari sala satu informan pihak dinas sosial Kab Barru tentang Pembagian kerja antara dinas sosial, kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai Sebagai Berikut:

“Kami dinas sosial dalam rangka meningkatkan efektivitas BPNT ada hal-hal serius yang perlu dilakukan yaitu mencakup koordinasi, pemantaun, evaluasi dan pelaporan, kami dinas sosial melakukan kegiatan pemantaun untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program BPNT pada saluran tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya begitupun juga di kecamatan dan melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing. Nanti hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada tim koordinasi Bansos Pangan Pusat”. (Hasil wawancara dengan R.N pada tanggal 23 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari dinas sosial mengungkapkan bahwa telah ada upaya yang serius dari pihak dinas sosial untuk terlibat secara nyata dan senantiasa mengambil peran penting dalam pelaksanaan Program BPNT untuk mengawasi dan memantau dan melaporkan setiap saat. Berhubung hasil wawancara diatas maka peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan pihak pemerintah kecamatan tentang pembagian kerja diperjelas pula oleh informan Pemerintah kecamatan Barru Dra.Hj.Mukarrama pihak seksi pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan sebagai Berikut:

“Jadi dikecamatan itu berfungsi sebagai tim koordinasi , selain sebagai tim koordinasi dikecamatan juga berfungsi sebagai social control dalam penyaluran, pemantauan, pelaporan Bantuan, artinya setiap kecamatan itu kalau kita pertama itukan sudah membantu dal hal verifikasi. Dalam hal ini menginstrusikan kepada TIKOR tingkat desa bahwa hari ini ada penyaluran hari ini jurusan ini dan sebagainya. Inilah bagian dari kerja-kerja kecamatan dalam membantu mengatur, begitupun desa sebenarnya hampir sama yang dikerjakan mereka

mengonfirmasi kepada kami apabila ada masalah. (Hasil wawancara dengan Hj.M pada tanggal 24 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Kecamatan dan Tim koordinasi Bansos Tingkat Kecamatan Berfungsi sebagai tim koordinasi ditingkat kecamatan dan sebagai Social Control dalam penyaluran, pemantaun dan pelaporan dan semua aktivitas yang dapat menunjang Berjalanya Penyaluran Bantuan Sosial. Berhubung hasil wawancara diatas maka peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan pihak TKSK Kecamatan Barru sebagai Pendamping BPNT ditingkat Kecamatan Sebagai Berikut:

“Jadi kami itu ada Pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai (PEDUM BPNT) yang dapat dijadikan Petunjuk dalam pengambilan tindakan apabila ada kendala yang terjadi”.(Hasil wawancara dengan .N.A pada tanggal 26 maret 2021).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan TKSK Kecamatan Barru dapat disimpulkan bahwa ada pedoman yang dijadikan Petunjuk dan pengambil tindakan apabila ada kendala dalam pelaksanaan program BPNT. Berhubung hasil wawancara diatas maka peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak pemerintah desa anabanua Berikut hasil wawancara dengan S.M selaku Sekretaris desa anabanua sebagai berikut:

“Untuk aparat desa Setiap ada penyaluran pasti aparat desa juga turun meninjau secara berkala keberadaan dan keberlangsungan di agen sebagai pihak penyalur BPNT memantau kondisi alat, kualitas beras dan telur, nanti hasil nya itu kita laporkan ke tingkat kecamatan atau dinas untuk ditindak lanjuti”.(Hasil wawancara dengan S.M pada tanggal 26 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan sekretaris desa anabanua dapat dapat disimpulkan bahwa aparat desa juga turun meninjau langsung

Penyaluran BPNT memantau kondisi alat apakah layak dipakai atau belum sehingga nanti tidak ada kendala dalam proses penyaluran dan melihat kualitas beras dan telur dan nanti hasilnya dilaporkan ditingkat kecamatan atau dinas sosial untuk ditindak lanjuti.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyusunan bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Pemerintah daerah harus bekerja secara terkoordinasi dan disiplin itu terbukti dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, pihak kecamatan dan kelurahan menjalankan apa yang telah dipesankan oleh pihak dinas sosial sebagai tim koordinasi di kabupaten dalam menjalankan tugas tanpa melakukan kepelecehan dan kelalaian tugas jika telah diamanahkan tanggung jawab di pundaknya. Dinas sosial sangat disiplin dalam menjalankan tugas itu terbukti dari salah satu informan dari pihak dinas sosial mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Kami di dinas sosial sangat disiplin selalu melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk menciptakan sinkronisasi dan memelihara hubungan kerja, begitupun dengan pegawai staff kami di dinas sosial selalu melakukan briefing staff, Rapat, untuk menyampaikan penjelasan dan pemahaman mengenai apa yang telah diberitahukan kepada pegawai kami sehingga dapat

menjalankan pekerjaannya dengan efektif dan efisien apalagi tentang kesejahteraan masyarakat”.(Hasil wawancara dengan R.N pada tanggal 23 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dinas sosial sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Berhubung hasil wawancara diatas maka peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak pemerintah kecamatan Barru Ibu camat Kecamatan Barru sebagai berikut:

“Kalau kita berbicara disiplin kan itu timbul dari diri kita sendiri untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku apabila datang kekantor tepat pada waktunya, apapun yang telah menjadi ketentuan pemerintah pusat maupun daerah harus patuh dan mentaati serta mematuhi semua yang berkenaan dengan kewajiban dan larangan dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai visi misi kami.(Hasil wawancara dengan HJ.A.H pada tanggal 24 maret 2021).

Hasil wawancara diatas oleh informan Camat Barru Yang mengatakan bahwa apa yang telah menjadi keputusan pemerintah baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dijalankan secara bersama-sama. Dengan secara bersama-sama menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah nantinya diharapkan menjadi acuan sehingga dapat pula menetralsisir beberapa pelanggaran yang akan mungkin terjadi. sementara itu adapun hasil wawancara yng dilakukan didesa anabanua yakni sebagai berikut:

“Kami aparat desa sangat disiplin setiap ada pembagian atau penyaluran juga turun meninjau karna biasa antri jadi itu agen biasa kewalahan jadi kami aparat desa itu biasa turun untuk mengatur biar tidak antri”.(Hasil wawancara dengan S.M pada tanggal 26 maret 2021).

Berdasarkan Pandangan dari pihak pemerintah desa diatas itu menunjukkan bahwa dukungan ataupun sikap sudah direalisasikan dengan baik pada saat penyaluran BPNT, baik itu dalam bentuk pemantauan memberikan keamanan kepada agen BPNT. dari pandangan diatas tersebut diatas juga diakui oleh masyarakat yang menjadi KPM yakni Hartawan, ia merupakan KPM dari desa anabanua dusun Banga-Banga. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Pak desa biasa datang itu lihat-lihat, memantau itu anu penyaluran karna Biasa antri kalau adami info natau masyarakat” (Hasil Wawancara dengan H.W Pada tanggal 28 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan atau sikap dari pihak pemerintah desa sudah baik kepada masyarakat dengan turun langsung dan ikut serta melihat dan memantau proses peyaluran BPNT.

C. Pembahasan

1. Kesatuan tindakan

Kesatuan tindakan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik, jadi dalam pelaksanaan BPNT harus menyatukan tindakan sehingga segenab kegiatan manajemen maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpan siur, tidak berlawanan dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapain tujuan dengan efesien. Kesatuan tindakan dapat meghindari berbagai kemungkinan untuk merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bedasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dilihat bahwa dinas sosial, Kecamatan dan Kelurahan selalu melakukan pertemuan dan berkoordinasi bersama agar tercipta kesatuan tindakan agar terjadi sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari teori yang menjadi rujukan dan hasil penelitian dilapangan penulis dapat menyimpulkan kegiatan pelaksanaan program BPN Memang seharusnya diperlukan kesatuan tindakan antara dinas sosial, kecamatan dan kelurahan agar peran masing-masing pihak dapat terlihat jelas.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi yang sekurang-kurangnya antara dua pihak yang berperan sebagai (*sender*) dan penerimaan (*receiver*) dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, Karen komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagai besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalini hidup dan kehidupannya.

Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan semua pihak yang terkait untuk pencapaian tujuan bersama. Semua pihak yang melakukan koordinasi dan hubungan kerja pada dasarnya melakukan komunikasi. Dalam melakukan komunikasi juga perlu memperhatikan elemen-elemen dan jenis-jenis komunikasi yang ada agar dapat berkomunikasi efektif.

Dari rujukan teori dan hasil penelitian penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa pihak dinas sosial kabupaten barru telah melakukan komunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan program BPNT.

3. Pembagian Kerja

Koordinasi dan hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pembagian tugas. Tugas-tugas ini diwadahkan dalam unit-unit sebagai pelaksana dan penanggung jawab satu atau beberapa fungsi. Semua pihak dalam organisasi baik dari pihak pemerintah daerah, kecamatan maupun kelurahan agar dapat berjalan terpadu, serasi dan selaras dalam pencapaian tujuan dan sasaran bersama dari masing-masing tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait indikator pembagian kerja dinas sosial mengemukakan bahwa telah ada upaya yang serius dari pihak dinas sosial untuk terlibat secara nyata dan senantiasa mengambil peran penting dalam pelaksanaan Program BPNT untuk mengawasi dan memantau dan melaporkan setiap saat.

Dari rujukan teori yang dibangun dan dari hasil penelitian penulis menyimpulkan Tim koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Berfungsi Sebagai Social Control dalam penyaluran, pemantauan dan pelaporan dan semua aktivitas yang dapat menunjang Berjalanya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyusuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. Pemerintah daerah harus bekerja secara terkoordinasi dan disiplin itu terbukti dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, pihak kecamatan dan kelurahan menjalankan apa yang telah dipesankan oleh pihak dinas sosial sebagai tim koordinasi dikabupaten dalam menjalankan tugas tanpa melakukan kepemihakan dan kelalaian tugas jika telah diamanahkan tanggung jawab di pundaknya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait indikator Disiplin dinas sosial sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.

Dari rujukan teori dan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan dukungan ataupun sikap sudah direalisasikan dengan baik pada saat penyaluran BPNT, baik itu dalam bentuk pemantauan, penyaluran memberikan keamanan kepada agen BPNT.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program BPNT dikecamatan Barru Kabupaten Barru, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya koordinasi dalam pelaksanaan program BPNT, sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan program BPNT untuk Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pendukung

Faktor pendukung yakni semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya segala sesuatu dan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang mendukung dan mendorong terjadinya koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikecamatan Barru Kabupaten Barru. Salah satu yang menjadi semangat dalam memperlancar Program BPNT adalah tingginya respon masyarakat dalam menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan mudahnya masyarakat penerima dikumpulkan pada saat akan dicairkan bantuan. Berikut Point-Point Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dikecamatan Barru yang peneliti temukan di lapangan sebagai berikut:

- a. Besarnya antusiasme masyarakat pada saat akan dijadwalkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

- b. Efektifnya kinerja TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam mendampingi agen dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
- c. Adanya Support dari Pemerintah setempat ikut serta memantau Penyaluran Program BPNT.

Berdasarkan Point-Point Faktor Pendukung diatas maka peneliti menuturkan hasil wawancara dengan informan penelitian dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kecamatan Barru sebagai berikut:

“Tanggal 10 itu masukmi saldonya jadi masyarakat antusias sekali datang di agen pada saat akan disalurkan Bantuan makanya setengah mati itu agen kalau datang semua masyarakat, tapi biasa ada itu masyarakat 1 orang tetangganya Dipercayai untuk ambil bantuanya tinggal kumpul saja kartunya apalagi yang tidak ada motornya kasian. susah”.(Hasil wawancara dengan M.N.A Pada tanggal 26 Maret 2021).

Sama halnya dengan yang diungkapkan informan TKSK diatas, Samsuardi Manggenre, sekdes desa anabanua. Menurutnya faktor yang mendukung berjalannya program BPNT ini adalah besarnya antusiasme masyarakat pada saat akan dijadwalkan proses penyaluran bantuan tersebut, bahkan banyak dari mereka setiap hari datang bertanya mengenai jadwal penyaluran bantuan tersebut, faktor opendukung lain juga datang dari efektifnya kinerja TKSK dalam mendamoingi agen dan KPM dalam proses pelaksanaan program BPNT, serta adanya support darir

pemerintah setempat ikut serta memantau proses penyaluran Program BPNT ini, berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Biasanya KPM lewat didepan toko singgah bertanya sudah keluarkah tidak? Karna sudah taumi bilang tanggal segini sudah masuk saldonya jadi pas ada warga yang bertanya kita iyakan nanti dia Tanya temannya. kalau menurut saya sudah jelas pendampingnya, karena kalau ada apa-apa misalkan kita penyaluran seperti ini ada warga yang ingin bertanya tentang seputaran BPNT ataupun hal-hal lain warga ke TKSK, karna pasti datang setiap penyaluran. Sejah ini pemerintah setempat itu sangat mendukung bahkan sangat mengapresiasi dengan adanya BPNT, karena masyarakatnya sangat terbantu, bentuk pengapresiasinya dengan adanya ini karna biasa datang pak desa dan TKSK penyaluran pasti datang kesini untuk menyaksikan warganya”.(Hasil wawancara dengan S.M pada tanggal 27 maret 2021.)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan faktor pendukung dalam pelaksanaan program BPNT adalah dukungan finansial yang terus mengalir pada saat pencairan dan pemerintah setempat turun langsung melihat dan memantau dan beberapa pihak lainnya juga turun memantau pada saat penyaluran BPNT sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan Program BPNT, proses pencairan merupakan hal penting sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu dalam proses pencairan menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam proses pencairan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu dengan anggaran yang cukup pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup KPM Sebagai tujuan program dapat meningkat.

2. Penghambat

Didalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendukung saja, akan tetapi juga ada faktor penghambat pada penelitian ini adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat dan menahan terjadinya segala sesuatu dapat dilihat dari kendala yang ditemukan dalam proses koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dikecamatan barru kabupaten barru. Untuk mengetahui faktor penghambat maka dilakukan wawancara dengan informan Muhammad Nur Abduh, S.E Sebagai TKSK kecamatan Barru mengungkapkan bahwa ada beberapa factor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program BPNT dikecamatan Barru. Berikut Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Adapun kendala yang dihadapi adalah masih ada Beberapa KPM yang mengalami saldo nol sehingga belum bias mengambil sembako, atas permasalahan tersebut kami merekap dan melaporkan kepada pihak Dinas sosial apalagi ini mau menjelang Bulan Suci Ramadhan sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat”.(Hasil wawancara dengan M.N.A pada tanggal 26 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan hasil wawancara diatas bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program BPNT adalah salah satunya yaitu ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang mengalami saldo nol sehingga belum bisa mengambil sembako sehingga TKSK akan merekap dan melaporkan kepada Dinas Sosial. Kemudian TKSK kecamatan Barru melanjutkan bahwa kendala juga dari mesin EDC, alat yang digunakan pada saat pencairan bantuan tersebut berikut hasil wawancara dengan informan:

“Mesin EDC adalah perangkat utama dalam hal proses penyaluran itu harus dicek dulu kesiapan mesin EDC, apa tidak mengalami error atau bagaimana itu yang sering terjadi, sala satu penghambatnya adalah biasa signal tidak mampu, karna ada beberapa desa yang sangat tidak terlalu bagus jaringannya sehingga pada saat itu baru beberapa dia gesek error lagi, hilang jaringan lagi dan terkendala juga dengan beberapa kartu yang masih rusak, pinnya error juga.”(Hasil wawancara dengan M.N.A pada tanggal 26 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Barru. Pertama yaitu masih sering terjadi saldo nol pada kartu KPM sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari program BPNT dan Yang Kedua yaitu seringnya terjadi error pada mesin EDC pada saat transaksi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kendala tersebut dialami oleh hampir semua agen yang ada dikecamatan Barru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya tentang Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Barru Kabupaten Barru maka penulis mengambil kesimpulan dari empat (4) point indikator yaitu Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin dan diperkuat dengan adanya Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penelitian ini berikut kesimpulan dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan Pemerintah yaitu Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah dilakukan dengan Baik. Dimana sala satu bukti yakni Kerja sama antara organisasi Pemerintah dalam mengadakan sosialisasi dengan memeberikan pemahaman mengenai Apa itu BPNT dan seperti apa itu model BPNT
2. Komunikasi Organisasi Pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah berjalan dan masih banyak kendala yang harus ditingkatkan dan masyarakat pun juga sangat merespon baik kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah.
3. Pembagian Kerja Organisasi Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan telah ada upaya yang serius dari pihak

pemerintah untuk terlibat secara nyata dan senantiasa mengambil peran penting dalam pelaksanaan Program BPNT untuk mengawasi dan memantau dan melaporkan setiap saat.

4. Disiplin dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai sudah berjalan dengan baik dengan dukungan atau sikap dari pihak pemerintah daerah sudah baik kepada masyarakat dan ikut serta dalam memantau berjalannya proses penyaluran BPNT.
5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penelitian ini yaitu Faktor Pendukungnya adalah dukungan finansial yang terus mengalir pada saat pencairan sehingga dapat menentukan kesuksesan dalam pelaksanaan Program BPNT dan Faktor Penghambatnya adalah masih sering terjadi saldo nol pada kartu KPM dan seringnya terjadi error pada mesin EDC pada saat transaksi penyaluran BPNT.

B. Saran

1. Dalam aspek komunikasi khususnya edukasi dan sosialisasi keseluruhan pihak terkait harus ditingkatkan lagi dan lebih rutin.
2. Pemerintah Kabupaten Barru mungkin sekiranya lebih teliti dan memperhatikan lagi Apakah Program BPNT sudah berjalan menyeluruh atau belum
3. Proses Monitoring dan evaluasi Program BPNT diharapkan dapat selalu ditingkatkan agar indikator-indikator keberhasilan dari program BPNT tercapai, khususnya dalam Koordinasi Pelaksanaan Program BPNT dikecamatan Barru.

4. Tim Pelaksanana BPNT Kecamatan lebih memerhatikan saldo KPM karna banyak mengalami saldo Nol agar masyarakat dapat menerima bantuan tepat waktu
5. Tim Pelaksana BPNT harus teliti dalam mengecek kondisi mesin EDC agar tidak mengalami Error



DAFTAR PUSTAKA

- Fitria. (2018). Pengaruh Komunikasi dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(1), 125–137.
- Handayaniingrat, Soewarno. (2001). *Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta
- Handayaniingrat, Soewarno. (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Haji Masagung
- Handoko, T. Hari. (2011). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Kepala Biro Hukum dan Kemensos. (2017). *Peraturan Menteri Sosial Republik Jakarta*: Kepala Biro Hukum dan Kemensos.
- Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). *Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Mamumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka)*. 1(April).
- Manoppo, I. R. A., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Moleong J, Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya
- Pratiwi, N. I. (2017). *Penggunaan Media Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi*. 1, 202–224.
- Rakhmat, M., & Wahid, A. A. (2016). Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Petugas Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. *Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 07, 21–26.
- Salibabu, K., Kepulauan, K., & Rompas, W. Y. (n.d.). *Koordinasi pemerintah daerah dalam pembangunan jalan di kecamatan salibabu kabupaten kepulauan talaud*. 1–9.
- Sugandha Dann, (2000). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.

Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

Syamsi, Ibnu. (1994). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Tresiana, Novita. 2016. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara

Undang Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Sosial No.40 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan (PKH)

Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan inklusif(SNKI).

Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai (BSNT).

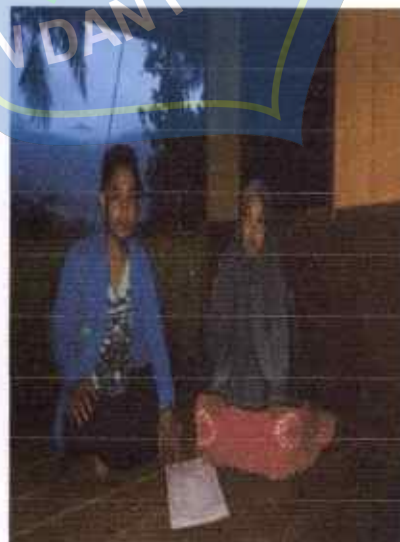
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. SKRT 2017. Program RASTRA Masih Hadapi Persoalan Ketidakpastian.

Westra, Pariata, (2001). *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



A

N







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBAIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Nuruddin No. 200, Tj. Peta 90221, Makassar 90221 E-mail: info@umh.ac.id



Nomor: S64/05/C.4-VIII/H/40/2021
Lamp: 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal: Permohonan Izin Penelitian

27 Jumadil akhir 1442 H
09 February 2021 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T HKPMID Prov. Sul-Sel
di-

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0206/TSP.A.I-VIII/H/1442 H/2020 M tanggal 8 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: RISWANDI

No. Stribuk: 105641106416

Fakultas: Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan: Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan: Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Februari 2021 s/d 12 April 2021

Selubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

الشكركم على تعاونكم وكرمكم

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **10890/S.01/PTSP/2021**
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bupati Barru

di Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 861/05/C.4-VIII/042/2021 tanggal 09 Februari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti bernama:

Nama : **RISWANDI**
 Nomor Pokok : **105641106416**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
 Alamat : **Jl. Sir Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

*** KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU ***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Februari** s.d. **09 April 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : **09 Februari 2021**

A.B. GOBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

[Signature]

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19710501 199803 1 004

Terselamatkan Yth.
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. Penanggung

SRMP/PTSP/042-2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax: (0411) 448936
 Website : <http://www.sulselprov.go.id> Email : psp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Riswandi

NIM : 105641106416

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	16%	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	4%	10 %
5	Bab 5	3%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 6 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah, S Hum, M.I.P
NBM. 964 591

AB I RISWANDI 105641106416

by Tahap Tutup



ission date: 06-Jan-2022 09:03AM (UTC+0700)

ission ID: 1737955351

me: 1361111730_1641360925221_BAB_I_REVISI_2_SKRIPSI_Riswandi_1.docx (23.83K)

count: 918

cter count: 6381

FINALITY REPORT

3%	11%	11%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

jurnal.fkip.unila.ac.id	Internet Source	4%
repository.unhas.ac.id	Internet Source	4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On



AB II RISWANDI 105641106416

by Tahap Tutup



ission date: 04-Jan-2022 01:51PM (UTC+0700)

ission ID: 1737333751

me: BAB_II_REVISI_SKRIPSI_Riswandi.docx (58.18K)

count: 3826

cter count: 26574

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

 digilib.unila.ac.id
Internet Source 8%

 scholar.unand.ac.id
Internet Source 3%

 repositori.usu.ac.id
Internet Source 2%

 miya9bhe.wordpress.com
Internet Source 2%

include quotes On

include bibliography On

Exclude matches

BAB III RISWANDI

105641106416

by Tahap Tutup

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ission date: 06-Jan-2022 09:03AM (UTC+0700)

ission ID: 1737955478

me: 1641361194201_BAB_III_REVISI_2_SKRIPSI_Riswandi_1.docx (25.18K)

count: 724

cter count: 4774

ORIGINALITY REPORT

9%	7%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Submitted to UIN Raden Intan Lampung	2%
Student Paper	
digilibadmin.unismuh.ac.id	2%
Internet Source	
eprints.walisongo.ac.id	2%
Internet Source	
docplayer.info	2%
Internet Source	

include quotes ☒ On
include bibliography ☒ On
exclude matches ☐ Off

BAB IV RISWANDI

105641106416

by Tahap Tutup

ission date: 06-Jan-2022 09:05AM (UTC+0700)

ission ID: 1737955771

me: 1641361201137_BAB_IV_REVISI_2_SKRIPSI_Riswandi_1.docx (232.49K)

count: 4694

cter count: 30478

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	4%
	Internet Source	

exclude quotes
exclude bibliography



BAB V RISWANDI 105641106416

by Tahap Tutup



mission date: 05-Jan-2022 01:37PM (UTC+0700)

mission ID: 1737659969

ame: 1641361101837_1641361029178_BAB_V_REVISI_2_SKRIPSI_Riswandi.docx (16.55K)

count: 320

cter count: 2044

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.unizar.ac.id	Internet Source	3%
---	------------------------	-----------------	----

Exclude quotes

Exclude bibliography

On

Co

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis **RISWANDI**, lahir pada tanggal 05 Juni 1998 di Banga-Banga Provinsi Sulawesi Selatan. Yang merupakan buah hati dari Ayahanda Halim dan Ibunda Suriani. Sebagai anak ke-3 dari 4 bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Inpres Banga-Banga Kecamatan Barru Kabupaten Barru dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Barru dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK 2 Soppeng pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis sangat bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan umur panjang sampai saat ini sehingga penulis dapat melewati masa-masa tersulit di hidup. Harapan penulis semoga ilmu yang didapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang terdekat, maupun masyarakat luas dan tujuan penulis yang paling penting dari perjalanan selama ini adalah untuk membahagiakan orangtua serta orang-orang tersayang.